



## **Faktor-Faktor Manuver Politik Qatar dalam Penguatan Aliansi dengan Iran Pasca Kasus Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017**

**Sukma Bintang Cahyani**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Qatar as a small and wealthy country in the Persian Gulf was being hit by serious diplomatic crisis in the past 2017. The Crisis began when Saudi Arabia, Uni Arab Emirat, Bahrain, and Egypt (named as anti Qatar-quartet) accused Qatar for supporting terrorist group and Its alliance with Iran by doing blockade and terminated their diplomatic relations to Qatar. Some resolution efforts have been made to solve the conflict which happened inside the GCC. It was failed, included mediation from Kuwait. This conflict resolution efforts were leaving 13 demands from anti-Qatar Quartet that hurting the independence and sovereignty of Qatar, especially the demand of shutting down Al-Jazeera, to cut relations with Ikhwanul Muslimin and Iran. The real problem started when Qatar rejected those 13 demands and contrary has strengthening its alliance with Iran. The purpose of this research is to explain what are the driving factors of Qatar to take the political risk by strengthening its alliance with Iran rather than recovering its diplomatic relations with anti-Qatar Quartet by comply the 13 demands. The main argument of this research believes that Qatar as a small country is being weakened by the strong power of quartet. It causes the imbalance of power between them so Qatar choose to strengthens its alliance with Iran to increase its power in the crisis to confront the power of anti-Qatar Quartet threats. This research is analyzed using the concept of bandwagoning in the theory framework of neo-realist's balance of power with qualitative descriptive research methods by using interview and literature review. The Qatar's alliance strengthening with Iran will be explained by four factors based on theory analysis, such as: security factor, the inefficiency of GCC's factor, The Trump's factor and the LNG'S factor. The result is proved that the bandwagon effort of Qatar to Iran in the diplomatic crisis 2017 became the strategic solution for Qatar. In the end Qatar were able to survive and obtain its own security. Together with Iran, Qatar managed to increase its power to face the threats of Anti-Qatar Quartet and keep surviving in the regional structure.*

**Keywords :** *Qatar Diplomatic Crisis, Iran, Neo-realism, Bandwagoning, Driving Factors.*

### **PENDAHULUAN**

Qatar merupakan negara kecil yang tumbuh menjadi kaya raya. Pertumbuhan ekonomi Qatar juga menandai pertumbuhan peran politik Qatar di Kawasan. Qatar sempat mengalami revolusi dalam pemerintahan ketika Mantan amir Hamad bin Khalifa Al Thani menggulingkan ayahnya dalam kudeta tak berdarah pada tahun 1995 (cia.gov, 2018) . Kudeta tersebut mengantar reformasi politik dan media yang meluas sehingga membuat peran kepemimpinan regional Qatar kian berkembang (cia.gov 2018). Qatar menjadi negara yang semakin terpendang setelah Al-Jazeera, jaringan media yang ia miliki berkembang pesat dan oleh perannya sebagai mediator di beberapa konflik regional. Kekayaan yang dimiliki Qatar juga menciptakan *bargaining position* yang cukup strategis di Timur Tengah. Qatar

juga menjadi memiliki kebijakan luar negeri yang independent, namun hal tersebut membuat tetangga-tetangganya geram. Qatar sudah beberapa kali mendapat sanksi dari negara-negara tetangganya akibat kebijakannya yang terlalu independen. Keterlibatan Qatar dalam *Arab Spring* ; Intervensi Al-Jazeera ; Pelanggaran terhadap *Riyadh Agreement* ; serta kedekatannya dengan Iran memupuk amarah negara-negara tetangga Qatar di Teluk

Sampai akhirnya Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017 terjadi di dalam Badan GCC (Gulf Cooperation Council) dengan tuduhan pro terorisme dan pro Iran. 5 Juni 2017 Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut dipertegas oleh negara-negara tersebut dengan menarik Duta Besar mereka dan melakukan blokade terhadap Qatar di bidang penerbangan dan perjalanan. Krisis Diplomatik yang dialami oleh Qatar ini disebabkan oleh tuduhan Arab Saudi yang menyatakan bahwa Qatar telah mendanai organisasi terorisme. Arab Saudi mengatakan mereka mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik karena Qatar merangkul berbagai macam kelompok teroris dan kelompok sektarian seperti Ikhwanul Muslimin, al-Qaida, *Islamic State* dan kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran di wilayah timur provinsi Qatif yang bertujuan untuk mengacaukan Kawasan, hal tersebut sempat diberitakan dalam siaran Televisi Arab Saudi (Wintour, 2017). Upaya resolusi telah diselenggarakan. Kuwait sempat memediasi kedua belah pihak, walaupun akhirnya gagal dan menyisakan 13 tuntutan berat yang diajukan kuartet untuk Qatar sebagai syarat normalisasi hubungan diplomatik.

Yang menarik dan menjadi masalah dalam kasus ini adalah Qatar mempersiapkan kebijakan luar negeri yang baru dengan memusatkan hubungannya dengan Teheran. Sejak gagalnya mediasi dari Kuwait yang menghasilkan 13 tuntutan negara kuartet pasca Krisis Diplomatik Juni 2017, Qatar telah memutuskan hubungan dengan tiga anggota negara GCC, mengabaikan 13 tuntutan yang dilayangkan oleh kuartet anti-Qatar, dan memperkuat aliansinya dengan Iran. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari penulis bahwa mengapa Qatar lebih memilih untuk memperkuat aliansinya dengan Iran daripada patuh kepada tuntutan Kuartet, melihat bahwa Iran merupakan musuh dari sebagian besar negara-negara Teluk dan Iran juga menjadi akar perselisihan antara Qatar dengan kuartet anti-Qatar.

## **PEMBAHASAN**

### *Dinamika Kerenggangan Hubungan Bilateral antara Qatar dengan masing-masing negara kuartet anti Qatar*

Sebagai bahan perbandingan atas kebijakan manuver politik Qatar di tahun 2017 tersebut berikut sedikit dipaparkan beberapa dinamika kerenggangan hubungan bilateral Qatar dengan negara-negara kuartet anti Qatar. Hal ini juga menjelaskan bahwa krisis diplomatik Qatar tahun 2017 merupakan akumulasi dari konflik masa lalu. Menurut rekam sejarah, hubungan Qatar dengan negara-negara kuartet sudah menunjukkan dinamika yang kurang baik. Terutama dengan sang pelopor krisis, Arab Saudi. Posisi Qatar diantara negara-negara tetangganya selalu dalam kondisi waspada. Mereka tidak senang dengan “independensi” Qatar.

Dalam melaksanakan perannya di peristiwa-peristiwa politik kawasan, sebagai negara kecil Qatar dianggap kerap kali melampaui kewenangan-kewenangan negara besar. Sejak kepemimpinan Sheikh Hamad di tahun 1996 Qatar mulai membangun citra sebagai negara yang independen dan bersaha lepas dari kontro Arab Saudi. Sebelum memperoleh kemerdekaannya di tahun 1971, secara *de facto* Arab Saudi merupakan negara pelindung Qatar sehingga kekuasaan Arab Saudi terafiliasi sampai ke dalam urusan domestik Qatar. Pengaruh Arab Saudi ini pula yang membawa Qatar masuk ke dalam koalisi Dewan Keamanan Teluk atau GCC pada tahun 1981, yang nantinya mengekang kebijakan luar negeri Qatar termasuk hubungannya dengan Iran (Spyer, 2019). Bibit hubungan buruk antara Qatar dan Arab

Saudi sebenarnya sudah terlihat ketika Qatar mulai merdeka, di tahun 1988 Qatar dengan terbuka menjalin hubungan dengan Uni Soviet, musuh Arab Saudi pada masa itu. Qatar juga sempat terlibat sengketa wilayah dengan Arab Saudi yang memanas di tahun 1992 setelah dua orang tentara Qatar dibunuh diperbatasan wilayah yang disengketakan. Walaupun Qatar masih tergabung dalam koalisi Arab Saudi di Teluk Persia, namun hubungan kedua negara ini sebenarnya tidak pernah baik. 1998 setelah Emir Hamad merebut tahta ayahnya, Qatar mulai menunjukkan manuvernya dengan mendahului Arab Saudi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan China.

Terus berlanjut, pada tahun 2002, ketika Arab Saudi menarik duta besarnya dari Qatar untuk yang pertama kalinya, sebagai tanggapan atas kritik Al Jazeera terhadap pemerintah Arab Saudi (Fisher, 2017). Lalu setelah lima tahun dengan berbagai pertimbangan dan jaminan bahwa Al Jazeera tidak akan melakukan intervensi lagi, Duta Besar Saudi kembali bertugas di Qatar pada tahun 2008. Qatar kembali mengguncang Timur Tengah dan memperkeruh hubungannya kembali dengan Arab Saudi dengan memanfaatkan momentum *Arab spring*. Doha membanggakan diri atas dukungannya untuk banyak revolusi di Timur Tengah, khususnya di Libya dan Suriah (Fisher, 2017). Peristiwa *Arab Spring* tersebut juga membawa hubungan yang kurang baik antara Qatar dengan UEA. Dua negara ini sama-sama terlibat dalam kekisruhan yang terjadi di Libya, namun keduanya terlibat persaingan karena mendukung pihak yang berbeda, khususnya ketika tahun 2004 dimana terjadi persaingan kekuasaan antara Tobruk dan Tripoli di Libya. UEA bersama dengan Rusia dan Mesir, mendukung pemerintah Tobruk. Sedangkan Qatar, bersama dengan Turki dan Sudan, mendukung pemerintah yang dipimpin Ikhwanul Muslimin di Tripoli. Perang proksi antara Abu Dhabi dan Doha di Libya merupakan ilustrasi dari sebuah divisi di dalam Gulf Cooperation Council (GCC) yang terbukti sangat berpengaruh dalam membentuk tatanan politik pasca-Qaddafi di Libya (Cafiero & Wagner, 2015). Dari perang proksi tersebut kemudian meningkatkan sentimental UEA terhadap Qatar atas dukungannya terhadap apapun yang berhubungan dengan Ikhwanul Muslimin.

Sedangkan dengan Bahrain, Qatar sempat mengalami ketegangan karena perselisihan teritorial atas Kepulauan Hawar, Fasht Al Azm, Fasht Dibal, Qit'at Jaradah, dan Zubarah. Sengketa batas teritorial antara Bahrain dan Qatar memuncak pada tahun 1986 ketika Bahrain mendeklarasikan kemerdekaannya. Sengketa tersebut terjadi karena memperebutkan beberapa wilayah beserta ladang gas yang ada di dalamnya. Namun mulai diselesaikan pada tahun 1991-2001 melalui Mahkamah Internasional (ICJ) (Wiegand, 2012). Kerenggangan hubungan Qatar-Bahrain sebenarnya memuncak di tahun 2014 silam, ketika Qatar ikut campur pada urusan dalam negeri Bahrain. Kedutaan Besar Qatar di Manama memberi tawaran naturalisasi atau kewarganegaraan Qatar kepada beberapa anggota keluarga Bahrain dengan alih-alih mendapat berbagai hak istimewa di Qatar (Chief, 2014). Menurut Shaikh Rashid Bin Khalifa Al Khalifa anggota keluarga kerajaan Bahrain, naturalisasi yang dilakukan Qatar berdampak negatif terhadap situasi keamanan dan kepentingan nasional Bahrain (Chief, 2014).

Begitu juga di Mesir, Qatar melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Mesir. Sentimental Mesir terhadap Qatar juga dilandasi oleh sikap-sikap dukungan Qatar terhadap organisasi-organisasi Islam militan di Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin. Khususnya ketika revolusi Mesir yang dimulai dari tahun 2011 saat Hosni Mubarak digulingkan, Qatar mendukung presiden Mesir yang menang saat itu, Muhammad Mursi, yang tidak lain adalah seorang Ikhwanul Muslimin. Mantan otokrat Hosni Mubarak memandang Qatar dan jaringan Al Jazeera sebagai perusuh regional pada masa itu (Cunningham, 2014). Dalam dinamika-dinamika tersebut Qatar dianggap bersalah dan dibawa ke perjanjian Riyadh (2014) untuk menandatangani perjanjian mengenai kesepakatan untuk tidak turut campur dalam urusan dalam negeri negara manapun, tidak mendukung Ikhwanul Muslimin dan organisasi-

organisasi terorisme lainnya, membatasi bias dan kebebasan Al-Jazeera, dan berkontribusi serta mendukung pada keamanan dan stabilitas Mesir (Chief, 2014).

### *Penyebab Krisis Diplomatik Qatar tahun 2017*

Setelah terjerat Perjanjian Riyadh yang terbentuk sejak tahun 2013 akibat intervensi-intervensi Qatar pada urusan dalam negeri negara-negara kuartet, dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin (sebuah gerakan yang dianggap sebagai organisasi terorisme oleh koalisi Arab Saudi), keterlibatan media utama Qatar, Aljazeera dalam peristiwa-peristiwa *Arab Spring*, Emir Hamad menurunkan tahta kepada putranya Emir Tamim (Emir Qatar sampai saat ini). Sejak saat itu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kemudian berusaha mendinginkan suasana melalui penandatanganan Perjanjian Riyadh (2014). Namun Riyadh Agreement tersebut tidak sepenuhnya mengikat Qatar untuk patuh terhadap esensi di dalamnya. Riyadh menuduh Qatar melanggar *Riyadh Agreement* dengan poin: Qatar masih memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok Islam radikal seperti Ikhwanul Muslimin, Hamas, Al-Qaeda, ISIL, dan afiliasi teroris radikal di Libya. Dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin juga melanggar poin untuk menjaga stabilitas Mesir, mengingat kelompok tersebut adalah kelompok yang dianggap sebagai pendestabil keamanan dalam negeri Mesir dan negara-negara koalisi Arab Saudi lainnya. Selain itu, Al-Jazeera juga masih dianggap bias dalam memberitakan peristiwa di Timur Tengah dimana media ini begitu terbuka ketika memberitakan perkembangan yang terjadi di luar Qatar senyata-nyatanya namun berbanding terbalik ketika memberitakan hal-hal tentang Qatar.

Selain pelanggaran terhadap *Riyadh Agreement* krisis diplomatik Qatar juga didorong oleh sebab-sebab lain seperti, hubungan yang sangat dekat antara Qatar dan Iran terutama karena kerjasama mereka dalam pembagian ladang gas terbesar di dunia yaitu North Dome dan South Pars. Hal ini mengangis bawahi bahwa kuartet tidak pernah menyetujui hubungan baik dibidang apapun dengan Iran, dan hubungan baik Qatar-Iran tersebut meningkatkan sentimental kuartet dan kecemburuan. Selanjutnya krisis juga disebabkan setelah Media Qatar memberitakan berita bohong, dimana QNA (Qatar News Agency) memberitakan Kementerian Luar Negeri Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir, namun hal ini dibantah oleh pihak Qatar dan menyatakan bahwa QNA telah diretas. Selain itu, Sebuah laporan yang diterbitkan di situs *Qatar News Agency* (QNA) menyatakan bahwa Emir Qatar menyebut Iran sebagai "kekuatan besar" yang berpengaruh dalam stabilisasi Kawasan (Ulrichsen, 2017) juga turut memanas hubungan kuartet dan Qatar. Selain itu, krisis diplomatik Qatar ini juga didukung dengan kehadiran Trump sebagai aktor Amerika Serikat. AS melakukan eskalasi di Arab Saudi dan datang mendukung tindakan-tindakan kuartet untuk memerangi negara pendukung terorisme, tidak terkecuali Qatar. Trump atas nama Amerika Serikat sepenuhnya berada di belakang Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain dalam krisis diplomatik Qatar adalah diplomasi twitter yang ia buat. Trump bahkan menuliskan pujian melalui akun resmi Twitter @realDonaldTrump yang ditujukan kepada kuartet anti Qatar karena merealisasikan blokade Qatar. Selain itu, Trump juga mengecam para pemimpin Doha sebagai "penyanggah dana terorisme tingkat tinggi". Hal tersebut menyebabkan keyakinan kuartet untuk memberi sanksi kepada Qatar semakin bulat.

Blokade yang diikuti dengan pemutusan hubungan diplomatik oleh kuartet kepada Qatar akhirnya terjadi pada tanggal 5 Juni 2017. Krisis diplomatik tersebut memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap perekonomian, keamanan negara, ruang gerak Qatar, dan hak-hak asasi manusia di Qatar. Walaupun Qatar merupakan salah satu negara yang memiliki GDP tertinggi di dunia dan ekonomi Qatar memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk membuatnya tetap bertahan, tetapi kekurangan makanan dan barang-barang penting lainnya dapat mengganggu kehidupan dan bahkan menghasilkan ketidakstabilan

sosial (Rivlin & Friedman, 2017). Maskapai Qatar, Qatar airways mengalami kerugian sebesar QR252m (\$69 miliar) (Dudley, 2018). Warga negara Qatar diusir dari negara-negara kuartet, 3.251 pelajar yang tengah studi di negara-negara kuartet tidak mendapat hak siswanya dengan baik (OHCHR, 2017). Terdapat 1.120 artikel pers dan beberapa 600 karikatur anti-Qatar diterbitkan di Arab Saudi, UEA dan Bahrain antara bulan Juni dan Oktober 2017 yang menebarkan kebencian dan kampanye anti-Qatar (OHCHR, 2017). Dan krisis menyebabkan Qatar terisolasi serta kehilangan *power* di kawasan.

Krisis diplomatik Qatar ini telah banyak diupayakan untuk diselesaikan, termasuk mediasi dari pemimpin GCC saat itu, Kuwait. Namun gagal dan tidak mencapai tahap resolusi, yang tersisa hanya 13 tuntutan dari kuartet sebagai syarat bagi Qatar untuk memulihkan hubungannya dengan mereka. Tiga tuntutan yang paling menarik perhatian adalah Qatar dituntut untuk menutup Al-Jazeera, memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, memutus hubungan dengan Iran, serta Qatar diwajibkan membayar kompensasi dana yang terpakai saat krisis terjadi dan bersedia di kontrol dan diawasi oleh kuartet. Hal tersebut ditolak oleh Qatar karena dianggap melanggar kemerdekaan dan kedaulatan Qatar.

Alih-alih semakin tertekan, Qatar justru dapat membangkitkan stabilitas negaranya dengan kebijakan-kebijakan baru yang ia bentuk. Kontradiksi diantara kedua belah pihak ini dikhawatirkan dapat memicu konflik ke jangka yang lebih panjang, oleh karena itu banyak pihak yang mengharapkan krisis tersebut segera diselesaikan. Adapun upaya Qatar untuk menstabilkan negaranya pasca terjadi krisis diplomatik yang dimaksud peneliti adalah ketika Qatar mengeluarkan kebijakan luar negeri baru, pihaknya menyatakan bahwa Qatar akan memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Iran pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 melalui website resmi Kementerian Luar Negerinya ([www.mofa.gov.qa](http://www.mofa.gov.qa)). Alhasil, persekongkolan geopolitik tersebut telah menempatkan negara Teluk Persia yang kecil namun sangat kaya itu melawan tetangganya dan mengguncang bagian Timur Tengah yang sebelumnya tenang. Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa mereka mengirim duta besarnya kembali ke Teheran setelah absen 20 bulan yang lalu terhitung sejak bulan Januari 2016 ketika terjadi serangan terhadap dua fasilitas diplomatik Saudi di Iran. Keputusan Qatar ini memang akan semakin memperparah hubungannya dengan negara Teluk, tetapi Qatar memutuskan untuk berhubungan baik dengan Iran (WALSH, 2017).

#### *Faktor-Faktor Yang Mendorong Qatar Untuk Memperkuat Aliansi Dengan Iran Pasca Krisis Diplomatik Qatar Tahun 2017*

Dalam kasus krisis diplomatik Qatar tahun 2017, untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong mengapa Qatar melakukan manuver politik dari koalisi Teluk dan memperkuat aliansi dengan Iran daripada patuh kepada kuartet anti Qatar, dan untuk dapat melihat secara jernih terkait faktor pendorong penguatan aliansi Qatar-Iran tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *bandwagoning* dari turunan teori neo-realis. Konsep tersebut terhubung secara berurutan dengan kondisi dimana negara berusaha untuk *survive* menurut neorealisme yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya : 1) Sistem Internasional Anarki, 2) Konflik, 3) Security Dilemma, dan 4) Balance of Power (Waltz, 1979).

Sifat anarkis dari sistem internasional membuat negara mencapai dilema keamanan. Kondisi struktur internasional yang anarki yang sampai menghasilkan kondisi konfliktual terlihat pada peristiwa dimana Arab Saudi, pelopor blokade Qatar tahun 2017 memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Iran, negara yang menjadi salah satu alasan Qatar mendapatkan sanksi blokade oleh kuartet anti Qatar. Ketidakhadiran otoritas tertinggi dalam sistem internasional menyebabkan adanya persaingan kekuasaan regional bahkan internasional. Dalam kasus ini persaingan kekuasaan utamanya melibatkan anggota-anggota GCC (*Gulf Cooperation Council*) dan Iran. Dalam kondisi ini menurut Waltz, *Security*

*Dilemma* adalah hal yang wajar terjadi.

Robert Jervis dalam bukunya “*cooperation under security dilemma*”, *Security dilemma* mengacu pada situasi ketika tindakan yang diambil sebuah negara untuk meningkatkan keamanannya seperti memperkuat militer atau membuat aliansi sehingga dapat memaksa negara lain mengambil tindakan yang sama untuk tetap bertahan dalam sistem internasional yang anarki. Secara geografis maupun geopolitik terletak antara Arab Saudi dan Iran, Qatar dikepung oleh kedua kekuatan regional Teluk Persia. Oleh sebab itu Qatar mengembangkan kebijakan luar negeri dan pertahanannya sendiri dengan mempertahankan kerja sama yang erat dengan negara-negara Teluk melalui GCC, pada saat yang sama Qatar juga merasa perlu untuk tetap berdialog dengan Iran. Koalisi baru yang dibentuk Arab Saudi sebagai kuartet anti Qatar telah melukai keamanan dan menciptakan *security dilemma* bagi Qatar. Hal tersebut memaksa Qatar untuk menghadapi dua pilihan kebijakan, yaitu kembali kedalam kontrol Saudi atau menciptakan kebijakan independen dan bebas untuk beraliansi dengan Iran.

Krisis diplomatik telah menyebabkan ketimpangan kekuatan Qatar dengan koalisi Arab Saudi. Keseimbangan power sangat membebani negara kecil di Teluk ini. Sehingga Qatar membutuhkan tambahan power. Ada dua bentuk *balance of power* menurut Waltz : *Balancing* dan *bandwagoning*. Dalam kondisi yang lemah akibat krisis dan tidak adanya sekutu lain menyebabkan Qatar tidak akan mampu menyeimbangkan kekuatannya seorang diri baik dengan kuartet anti Qatar maupun dengan Iran. Oleh karena itu sebagai negara kecil yang tengah rentan penelitian ini melihat *balance of power* yang dilakukan oleh Qatar adalah dalam bentuk *bandwagoning*. Dalam *bandwagoning* negara kecil akan memilih negara yang paling mengancam, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kekuatan-kekuatan musuhnya. Sehingga tepat jika Qatar melakukan *bandwagon* dengan Iran, untuk menambah pownya dalam menghadapi intimidasi kuartet dan mencapai keamanan negaranya sendiri. Strategi *bandwagoning* telah menghantarkan Qatar untuk bersekutu dengan negara yang sampai sekarang dianggap agresif oleh penentangannya, yaitu Iran.

Ketika kuartet anti Qatar menurunkan kapabilitas keamanan Qatar maka bekerja sama dengan negara besar memang diperlukan, kunci utama dari neorealis adalah keamanan, sehingga hubungan kerjasama antara negara besar dan kecil akan menciptakan *balance of power* yang ditujukan untuk memperkuat keamanan (Waltz, 1979). *Bandwagoning* dalam hubungan internasional terjadi ketika sebuah negara bersekutu dengan negara musuh yang lebih kuat dan mengakui bahwa teman-tapi-musuh tersebut mengambil untung dari perampasan yang mereka rebut bersama-sama (Mearsheimer, 2001 hlm 162-163). Aliansi *bandwagoning* terjadi hanya di bawah kondisi paksaan atau tidak stabil atau tidak pasti. Aliansi kategori ini menyiratkan keinginan untuk menginduksi perubahan sistemik dan atau perilaku mendestabilisasi (Schweller, 1994). *Bandwagoning* akan secara efektif bekerja apabila kedua belah pihak merupakan aliansi. Tidak ada keraguan bahwa hubungan bilateral dan aliansi antara Qatar dan Iran semakin tumbuh dan menguat dikala kedua negara tersebut bersama-sama menghadapi krisis diplomatik Qatar tahun 2017 silam. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif dalam pidatonya di Paris mengatakan bahwa blokade tersebut hanya mendorong Doha ke kemitraan yang lebih dekat dengan Tehran, “*They accuse Qatar of being close to Iran but with their measure... they push Qatar towards Iran. They are giving Qatar like a gift to Iran,*” (Deutsche Welle, 2017).

Mekanisme penguatan Aliansi Qatar-Iran dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: *Velayat of the Emir*” telah menjadi kunci paling penting untuk memahami hubungan kuat Qatar-Iran. Hal inilah yang membentuk aliansi antara pemimpin tertinggi di Teheran dan dua petinggi Qatar (Naji, 2012).; Pemerintah Qatar terus berupaya memosisikan dirinya sebagai negara yang cinta damai dan mediator pertikaian di kawasan (Direktorat Timur Tengah Kemenlu Indonesia, 2019). ,memperjuangkan strategi untuk mempertahankan hubungan

dengan "*friend and foe*" untuk menjadi pihak yang sangat diperlukan dan menjadi penggerak mediator kawasan, hubungan baik dengan Iran merupakan cara yang tepat untuk mencapainya.; Ekonomi memang menjadi hal yang mendasari kuatnya hubungan antara Qatar dan Iran. Kekuatan politik, penunjang keberhasilan diplomasi Qatar di kawasan, dan kekuatan Qatar lainnya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi Qatar. Iran banyak hadir dan menunjang aspek-aspek vital dalam perekonomian Qatar.

Sebagai penunjang dan pengikat hubungan bilateral keduanya, sejumlah MoU dan kerjasama yang telah disepakati kedua negara adalah sebagai berikut: Perjanjian Dermakasi , 1969 antara Mohammad Reza Shah Pahlavi (Iran) dan Emir Sheikh Hamad bin Khakifa Al-Thani (Made, 2017).; Trade Agreement , Juli 2017 di Doha (The Islamic Republic News Agency, 2017); Iran, Turkey, Qatar ink transit co-op MoU , November 2017 (Dudley, 2017); MoU untuk memfasilitasi kiriman Pos Qatar-Iran, Pengembangan kerjasama E-commerce serta ekspor impor melalui rute laut dan udara, April 2018 (Iran Daily, 2018); Dr. Hassan Rouhani menerima kredensial HE Mohammed bin Hamad Al Hajri , Duta Besar Qatar untuk Iran, Oktober 2018 Rouhani (Official website of the President of the Islamic Republic of Iran , 2018); Pakta Keamanan bersama , tahun 2010 (Al Meezan Qatar Legal Portal, 2013).

Cara Qatar menangani ancaman eksternal mencerminkan kemampuannya untuk bereaksi secara strategis terhadap kondisi eksternal. Perannya dapat tercermin melalui penjelasan Walt (1978) bahwa *Bandwagon* sendiri merupakan suatu upaya negara yang memiliki *power* yang lebih kecil untuk bergabung dan mengikuti negara yang memiliki *power* lebih besar untuk mendapatkan tambahan kekuatan dan keamanan bagi negaranya. Hal Ini menunjukkan bahwa dengan melakukan *bandwagon* kepada Iran , Qatar akan mendapatkan tambahan *power* untuk menghadapi dan melawan tekanan kuartet. Dari penjelasan tersebut maka muncul faktor-faktor yang mendorong atau memicu penguatan aliansi Qatar-Iran dalam kasus krisis diplomatik Qatar tahun 2017, di antaranya:

**Faktor Keamanan :** Keamanan menjadi faktor pertama yang muncul dalam langkah Qatar melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Iran dan memperkuat interaksi diantara keduanya. Jika melihat dampak dari krisis diplomatik Qatar, keamanan tentu saja menjadi aspek yang pertama kali disasar. Iran dalam hal ini menyambut keputusan dari Doha tersebut dengan mengirimkan pasokan makanan yang dibutuhkan selama krisis masih berjalan dan membuka ruang udaranya untuk penerbangan Qatar. Dengan beraliansi dengan Iran, Qatar dapat bebas dari intervensi dan kontrol Arab Saudi untuk berpolitik, pihak yang selalu mengekang independensi dan kedaulatan negaranya dalam membentuk kebijakan luar negeri. Qatar adalah negara yang tidak memiliki pertahanan militer yang kuat. Putusnya hubungan diplomatik Qatar dengan kuartet juga menyebabkan Qatar tidak memiliki perlindungan militer. Tetapi dengan dipulihkannya hubungan bilateral Qatar-Iran disemua bidang maka perjanjian keamanan dan kerjasama antara Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps Navy (IRGC-N) dengan Qatar Navy kembali berlanjut, sehingga kekuatan militer Qatar juga dapat meningkat, kekuatan militer Iran tidak dapat diragukan.

**Faktor Inefisiensi GCC (Gulf Cooperation Council) :** Menurut Qatar organisasi ini tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung gagal untuk menyelesaikan perselisihan antar anggotanya secara adil. Gagalnya GCC dalam menyelesaikan krisis diplomatik Qatar, memaksa Qatar untuk mencari aliansi lain. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani mengatakan bahwa Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dan sekretaris jendralnya sekarang tidak berdaya. Sheikh Mohammed juga menambahkan bahwa aliansi regional tersebut telah dirusak oleh krisis Teluk. Pihak qatar juga menyatakan bahwa aliansi dalam GCC perlu dibentuk kembali dan dirancang ulang untuk memastikan stabilitas keamanan kawasan di masa depan. Inefisiensi GCC menyebabkan Qatar terisolasi di organisasi dewan Keamanan ini, hal tersebut bukanlah suatu keuntungan bagi GCC, justru mengakibatkan Hubungan Qatar dan Iran kembali tumbuh. Dampak krisis

memberi kesempatan bagi Iran untuk datang sebagai penolong Qatar, dan mengangsur hubungan keduanya menjadi semakin dekat.

**Faktor Trump :** Faktor pendorong menguatnya hubungan Qatar dengan Iran ketiga yang didapatkan dari hasil analisa penulis adalah faktor Trump. Faktor ini muncul setelah penulis menemukan dan memaparkan data mengenai eskalasi Amerika Serikat yang terjadi di Arab Saudi sejak Amerika Serikat memasuki era Donald Trump. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, dalam krisis diplomatik Qatar Amerika Serikat khususnya dibawah kepemimpinan Donald Trump memiliki andil yang sangat signifikan (Kabalan, 2018). Terlepas dari semua tekanan, bagaimanapun, Qatar, mengejutkan banyak orang ketika memutuskan untuk melawan kuartet dan menjalin hubungan dengan Iran. Tujuan utama Qatar adalah untuk membekukan konflik dan mencegah tindakan bermusuhan lebih lanjut oleh negara-negara yang memblokadanya. Fokus kebijakan Qatar mengenai hal tersebut adalah Washington. Mengingat Iran merupakan ancaman terbesar bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dalam hal terorisme dan senjata nuklir. Hubungan Qatar-Iran akhirnya menciptakan kekhawatiran bagi Amerika Serikat karena secara tidak langsung, hal tersebut juga meningkatkan pengaruh Iran di wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat sadar bahwa Qatar, dengan bantuan Iran mampu menciptakan monopoli gas dengan konsekuensi bagi pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, krisis diplomatik ini telah menempatkan Amerika Serikat dalam dilema serius. Hasilnya, akhirnya Qatar memenangkan komitmen AS yang solid terhadap keamanannya sehingga Qatar mampu mengurangi agresor yang mengancamnya selama krisis diplomatik terjadi.

**Faktor Emir Hamad dan LNG :** menurut peneliti, faktor ini adalah faktor yang paling mendorong penguatan aliansi Qatar-Iran pada masa krisis diplomatik Qatar tahun 2017. Qatar memiliki hubungan ekonomi yang strategis dengan Iran terkait dengan ladang gas bersama dan memiliki batas maritim dengan Iran (Direktorat Timur Tengah Kemenlu Indonesia, 2019). Ladang gas North Dome merupakan aset ekonomi yang menjadi andalan Negara kecil berpenduduk sekitar 300.000 orang ini (Voice of America, 2010). Ditambah ladang gas tersebut merupakan ladang gas terbesar di dunia yang harus dibagi dengan Iran, dikarenakan ladang gas tersebut berbatasan langsung dengan wilayah maritim kedua negara ini. Iran dapat menjadi kekuatan yang sangat mengancam keamanan nasional dan sektor gas Qatar apabila kedua negara ini memiliki hubungan saling berselisih. Hal ini pernah terjadi di tahun 1991 ketika Iran pertama kali menemukan bagian ladang gas nya yaitu South Pars namun reda setelah keduanya menandatangani perjanjian dermakasi di tahun 1996 (Dargin, 2008), mengingat sektor gas ini merupakan aset yang sangat vital bagi pertahanan negara Qatar maka Qatar akan terus membutuhkan hubungan baik dengan Teheran. Sehingga Qatar tidak akan pernah mengucilkan Iran, karena hal tersebut akan membahayakan hubungan yang mendasari perkembangan ekonomi Qatar.

Sebagai negara yang sedang jatuh, daripada mencari dukungan dari mitra negara yang belum teruji, Qatar secara konsisten menekankan menciptakan hubungan strategis yang penting dengan Iran untuk tetap bisa bertahan hidup atau *survive*. Namun Bandwagon juga terjadi dalam pertukaran untuk saling menguntungkan antara negara yang lebih lemah dan yang lebih kuat. Bukti empiris dari rasa saling percaya atas pemberian keamanan dari Iran ke Qatar dengan imbalan Qatar patuh terhadap perjanjian pembagian ladang gas bersama (South Pars/North Dome) sehingga secara eksplisit Qatar membantu Iran memperkaya diri melalui pengelolaan ladang gas alam bersama tersebut. Qatar berkomitmen untuk tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan agresi militer apapun terhadap Iran, mengingat Qatar masih terikat dengan Amerika Serikat perihal pangkalan udara Al-Udeid, Qatar akan tetap berkomitmen menjaga hubungan yang damai dan mengusahakan penyelesaian masalah yang menyangkut soal Iran dengan cara damai. Karena dalam bandwagon keuntungan adalah untuk kedua belah pihak, namun, dalam jangka pendek dan jangka panjang negara kecil mendapatkan lebih

banyak keuntungan. Qatar melakukannya karena yakin bahwa bantuan Iran akan tersedia. Seperti Schweller (1994, hlm. 92-93) menyatakan dalam bahasa teori sistem, *bandwagoning* adalah bentuk umpan balik positif.

Peran Qatar dapat tercermin melalui penjelasan Walt (1987) bahwa negara-negara kecil lebih mungkin untuk melakukan *bandwagoning* dengan kekuatan besar yang agresif daripada berusaha menyeimbangi power negara besar terhadapnya. Studi ini juga menjawab bahwa ketika kemampuan tidak terdistribusi secara merata di antara negara-negara dalam suatu struktur regional maupun internasional, negara-negara yang memiliki kekuatan terbatas memilih untuk memaksimalkan keamanan mereka dengan cara yang berlawanan dengan peraturan yang ada sehingga menimbulkan potensi manuver. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal yang berlaku pada pertengahan 2017 menjadi hambatan bagi keamanan individual Qatar, sehingga pemerintahnya berusaha melepaskan diri dari kontrol negara-negara dominan di koalisi Arab Saudi. Kepercayaan yang dimiliki Qatar di Iran mendorongnya untuk lebih mendekat dan mendapatkan bantuan, Qatar mengharapkan Iran menyediakan keamanan. Menurut Waltz (1979, hal. 115), perilaku tersebut dibenarkan dengan beberapa alasan antara lain : karena Qatar menjadi korban pertama ekspansi atau intimidasi, karena Qatar tidak memiliki kapasitas untuk berdiri sendiri, dan karena aliansi Qatar di GCC beroperasi terlalu lambat untuk memberi bantuan atau penyelesaian yang tepat sehingga mengakomodasi kekuatan kuartet anti Qatar untuk semakin mengancam. Berdasarkan argumen Walt (1987), negara akan tergoda untuk ikut-ikutan ketika sekutu tidak tersedia. Pada saat krisis diplomatik 2017, Qatar tidak menemukan negara lain dalam sistem internasional yang dapat dipercaya untuk masalah-masalah pertahanan atau urusan luar. Iran adalah negara pertama dan satu-satunya yang siap memberikan bantuan bagi Doha sesaat setelah blokade dan pemutusan hubungan diplomatik dari kuartet terjadi. Ditambah Iran merupakan mitra strategis Qatar di berbagai bidang ekonomi yang cukup vital. Sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa Iran mampu meningkatkan kekuatan Qatar dalam menghadapi krisis diplomatiknya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan setelah memaparkan beberapa hal terkait penguatan aliansi Qatar-Iran pada kasus krisis diplomatik Qatar tahun 2017 dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Bandwagon dengan Iran merupakan cara yang strategis untuk memutar keadaan Qatar, sehingga mengantarkan negaranya ke tahap Survive. Salah satu hasil yang paling merusak dari krisis Qatar adalah telah terciptanya ketidakpercayaan antara Doha dan Riyadh. Qatar terus khawatir bahwa Arab Saudi memiliki ambisi untuk perubahan rezim di Doha dan terus mengejar Doha untuk hidup dibawah bayang-bayangnya. Dengan ambisi untuk lepas dari bayang-bayang Saudi dan bebas menjalankan kebijakan luarnegerinya yang independen, Qatar membutuhkan kekuatan tambahan untuk setidaknya dapat bertahan dalam struktur regional. Namun krisis diplomatik telah membawa dirinya terisolasi. Karena itu, tidak mudah bagi Qatar untuk meninggalkan Iran, negara yang membuka pintunya ke Doha pada saat krisis yang sulit. Bandwagon dengan Iran merupakan cara yang strategis untuk memutar keadaan Qatar, sehingga mengantarkan negaranya ke tahap Survive. Hal ini adalah situasi di mana keterlibatan Qatar dengan Iran menciptakan gagasan bahwa negara-negara, khususnya negara-negara yang lebih lemah akan mencari negara kuat lainnya untuk bergabung dan menambah povernya dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Qatar tidak dapat menyeimbangkan ancaman dengan kekuatannya sendiri yang lebih lemah dibandingkan agresor-agresornya, dan strategi yang dipilihnya selalu dimaksudkan untuk mencerminkan identitasnya sebagai negara kecil, lemah dan rentan di masa-masa krisis.

Pada akhirnya hal tersebut mampu meningkatkan kapabilitas Qatar di regional. Qatar berhasil meningkatkan power nya untuk menghadapi tuntutan Quartet, menurunkan tensi ancaman dari kuartet hasilnya Qatar berhasil mencapai keamanan dan bertahan dalam sistem internasional yang anarki sebagai negara yang independen. Bahkan peran Qatar dan Iran semakin menonjol di Kawasan, tentu hal ini merupakan capaian yang sangat strategis. Dengan di dorong oleh faktor keamanan, faktor inefisiensi GCC, Faktor Trump, dan Faktor ekonomi dalam bidang LNG beraliansi dengan Iran merupakan pilihan yang lebih menguntungkan dibanding memenuhi tuntutan penyelesaian yang diajukan oleh Kuartet.

Sampai pada akhirnya, Bandwagon dengan Iran merupakan cara yang strategis untuk memutar keadaan Qatar, sehingga mengantarkan negaranya ke tahap Survive. Hal tersebut juga mampu meningkatkan kapabilitas Qatar di regional. Kerjasama antara Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps Navy (IRGC-N) dengan Qatar Navy serta pakta keamanan bersama dengan Iran mampu meningkatkan kapabilitas militer sehingga keamanan Qatar terjamin. Kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Iran juga membawa perekonomian Qatar kembali naik dan stabil. Berlanjutnya pembagian ladang gas dengan Iran juga menambah kekuatan ekonomi Qatar. Pada akhirnya, Qatar berhasil meningkatkan *power* nya untuk menghadapi tuntutan Quartet, menurunkan tensi ancaman dari kuartet hasilnya Qatar berhasil mencapai keamanan dan bertahan dalam sistem internasional yang anarki sebagai negara yang independen. Bahkan peran Qatar dan Iran semakin menonjol di Kawasan, tentu hal ini merupakan capaian yang sangat strategis.

## REFERENSI

- Al Meezan Qatar Legal Portal, 2013. *تموكح و رطق ؤلود ؤموكح نيب ينمألانواع تلل ؤيقافتا*. [enilnO] *الجمهورية الإسلامية الإيد رانية*. Diakses pada tanggal 7 Juni 2019 melalui laman <http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1733&language=ar>
- Cafiero, G. & Wagner, D., 2015. How the Gulf Arab Rivalry Tore Libya Apart : Qatar and the UAE have deadly opposing interests in the North African state. [Online]. Diakses pada tanggal 2 April 2019 melalui laman <https://nationalinterest.org/feature/how-the-gulf-arab-rivalry-tore-libya-apart-14580?nopaging=1>
- Chief, H. T. B., 2014. Qatar naturalisation of Bahrainis criticised. [Online]. Diakses pada tanggal 2 April 2019 melalui laman <https://gulffnews.com/world/gulf/bahrain/qatar-naturalisation-of-bahrainis-criticised-1.1368101>
- Cunningham, E., 2014. Egypt's break with Qatar could contribute to a scorching summer for country's residents. [Online]. Diakses pada tanggal 6 April 2019 melalui laman [https://www.washingtonpost.com/world/middle\\_east/egypts-break-with-qatar-could-contribute-to-a-scorching-summer-for-countrys-residents/2014/05/21/c3cf1172-cd5d-4fed-8981-ea0142e75ab7\\_story.html?utm\\_term=.7ddda0ec7bcd](https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-break-with-qatar-could-contribute-to-a-scorching-summer-for-countrys-residents/2014/05/21/c3cf1172-cd5d-4fed-8981-ea0142e75ab7_story.html?utm_term=.7ddda0ec7bcd)
- Dargin, J., 2008. The Dolphin Project: The Development of a Gulf Gas Initiative. [Online]. Diakses pada tanggal 18 Mei 2019 melalui laman <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2010/11/NG22-TheDolphinProjectTheDevelopmentOfAGulfGasInitiative-JustinDargin-2008.pdf>
- Direktorat Timur Tengah Kemenlu Indonesia, 2019. Bcaground Information Negara Qatar, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Dudley, D., 2018. Qatar Airways Slumps Into The Red With \$69M Loss, As Impact Of Boycott Becomes Clear. [Online]. Diakses pada tanggal 23 April 2019 melalui laman <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/09/19/qatar-airways-slumps-to-loss/#26cc1ecb37e7>
- Fisher, M., 2017. How the Saudi-Qatar Rivalry, Now Combusting, Reshaped the Middle East. [Online]. Diakses pada tanggal 1 April 2019 melalui laman

